Social Investment
Knowledge Pod

Wadah artikulasi gagasan dan riset tentang investasi sosial yang memperkuat akuntabilitas, nilai keberlanjutan, dan kolaborasi lintas sektor.

Social Investment Indonesia

Artikel No. 158, Mei 2026

Kurban, Peternak Rakyat, dan Kemandirian Ternak Nasional



Oleh:
Purnomo
Senior Advisor
Social Investment Indonesia
Email:
purnomo@socialinvestment.id



Jumadi
Direktur Eksekutif
Negeri Ternak Indonesia
Email: Jumadi@socialinvestment.id

Abstrak

Momen Idul Adha di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, dengan nilai estimasi mencapai Rp 27,1 triliun pada tahun 2025. Namun, perputaran nilai yang masif ini belum berdampak optimal bagi kesejahteraan peternak rakyat yang menyuplai lebih dari 85% kebutuhan hewan kurban nasional. Rantai pasok yang ada saat ini masih diwarnai oleh asimetri informasi dan tekanan harga akibat persaingan antarlembaga kurban. Selain itu, tuntutan pasar terhadap hewan kurban terbaik memicu terjadinya seleksi negatif dan erosi genetik yang mengancam keberlanjutan ras ternak lokal.

Artikel ini menawarkan solusi struktural melalui implementasi Sistem Tiga Strata yang terintegrasi secara nasional: Breeding farm sebagai bank genetik pelindung bibit inti, Multiplier farm sebagai jembatan perbanyakan bibit unggul, danCommercial farm sebagai satu-satunya sumber hewan kurban yang sah.

Untuk mendukung sistem ini, diperlukan empat pergeseran paradigma dari sekadar aktivitas karitas (charity) menjadi investasi sosial transformatif, yaitu: transparansi rantai pasok berbasis infrastruktur digital, penerapan standar harga yang adil (fair trade), mekanisme reinvestasi dana kurban untuk pemberdayaan peternak, serta perluasan peran tokoh agama dalam menyuarakan keadilan ekonomi dan kelestarian alam. Melalui kolaborasi sinergis antara pemerintah, lembaga filantropi, korporasi, ulama, dan pekurban, ekosistem kurban dapat ditransformasikan menjadi motor penggerak utama kemandirian ternak dan ketahanan pangan protein nasional.

Kata Kunci: Kurban, Peternak Rakyat, Sistem Tiga Strata, Investasi Sosial, Erosi Genetik, Kemandirian Ternak.

Ketika Niat Mulia Bertemu Sistem yang Rapuh

Setiap Idul Adha, Indonesia bergerak dalam satu gerak yang langka: berbagi. Pada 1446 H (2025), Kementerian Agama mencatat lebih dari 1,8 juta ekor hewan kurban disembelih di seluruh kepulauan. Berdasarkan kajian IDEAS (Institute for Demographic and Poverty Studies), nilai ekonomi kurban tahun 2025 diestimasi mencapai Rp 27,1 triliun. Turun dari Rp 28,2 triliun pada 2024. Namun tetap merupakan perputaran nilai yang luar biasa besar dalam hitungan kurang dari dua minggu. Angka ini bukan sekadar statistik perayaan. Ukuran dari sebuah kekuatan sosial yang sesungguhnya: kemampuan puluhan juta orang Indonesia untuk bergerak bersama, secara serentak, didorong oleh keyakinan yang mendalam dan keikhlasan yang tidak perlu diragukan.



Namun kekuatan yang besar menuntut tanggung jawab yang besar pula. Nilai ekonomi yang berputar dalam dua minggu itu setara dengan berlipat kali anggaran pemerintah untuk pengembangan subsektor peternakan dalam setahun penuh. Di balik ritual yang penuh makna ini ada sistem rantai pasok yang menentukan siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan dari perputaran nilai yang masif itu. Pertanyaan yang semestinya kita ajukan bukan hanya tentang sahnya niat, melainkan tentang sejauh mana sistem yang kita bangun benar-benar mengantarkan kebaikan itu kepada mereka yang paling membutuhkan. Termasuk peternak rakyat yang menjadi tulang punggung pasokan hewan kurban nasional namun sering kali berada di posisi paling lemah dalam rantai tersebut.

Artikel ini tidak ditulis untuk meragukan satu pun dari jutaan niat baik yang menggerakkan momen kurban. Tapi ditulis untuk mengajak kita semua. Para peternak, lembaga, korporasi, pemerintah, ulama, dan para pekurban untuk melihat lebih dalam: bahwa di balik kebaikan yang nyata ada potensi kerusakan yang tidak disengaja, dan bahwa kita memiliki kapasitas bersama untuk mengubah keduanya sekaligus jika kita mau merancang sistem yang lebih baik.

Siapa yang Bergerak, dan Mengapa

Momen kurban menggerakkan banyak aktor dengan motivasi yang beragam, dan semuanya sah secara sosial. Lembaga filantropi Islam—Dompet Dhuafa, BAZNAS, Rumah Zakat, dan ratusan lembaga amil zakat daerah—menjadikan program kurban sebagai puncak kalender tahunan mereka. Ini bukan sekadar distribusi daging. Ini adalah pembuktian kapasitas kelembagaan, perluasan jangkauan ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), dan penguatan kepercayaan publik yang akan menjadi modal penggalangan dana di tahun berikutnya. Semakin jauh distribusi, semakin kuat narasi laporan tahunan.

Korporasi hadir dengan logika yang berbeda namun tidak kurang sahnya. Dalam kerangka CSR dan ESG, kurban adalah program yang relatif mudah dieksekusi, mudah dikomunikasikan, dan menghasilkan goodwill yang terasa langsung di komunitas sekitar operasional perusahaan. Bagi perusahaan yang beroperasi di tengah komunitas lokal seperti tambang, perkebunan besar, dan pabrik, hewan kurban yang dibagikan adalah bagian dari strategi menjaga social license to operate, mempertahankan hubungan dengan warga yang tidak bisa hanya bersifat transaksional.

Tokoh-tokoh sosial dan politik bergerak dalam logika yang dianalisis tajam oleh Marcel Mauss lebih dari seabad lalu: tidak ada pemberian yang benar-benar bebas. Setiap hadiah menanggung ekspektasi: loyalitas, suara, pengakuan sosial. Dengan tanpa mengurangi rasa keikhlasan para pekurban, yang pasti sudah berniat benar benar penuh keikhlasan. Tapi rasanya ada sedikit ruang juga untuk pemaknaan yang sedikit “nakal” -atau juga bisa kita berikan pada lokus unintended consequences- bahwa puluhan ekor sapi yang tersebar ke penjuru dapil adalah modal sosial yang sedang diinvestasikan, bukan sekadar sedekah dalam pengertian murni. Pierre Bourdieu akan menyebutnya sebagai konversi kapital ekonomi menjadi kapital simbolik. Sebuah transaksi yang tampak seperti kemurahan hati namun bekerja sebagai strategi reproduksi posisi sosial.

Dan di sisi paling hulu dari seluruh rantai ini berdiri peternak rakyat. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 (BPS), terdapat sekitar 12 juta rumah tangga yang mengusahakan subsektor peternakan di Indonesia, dengan lebih dari 4 juta unit usaha peternakan sapi potong. Mereka menyuplai lebih dari 85 persen hewan kurban nasional. Idul Adha adalah panen terbesar mereka. Kadang satu-satunya momen dalam setahun ketika permintaan datang dalam skala besar. Seharusnya ini adalah momen terbaik. Kenyataannya tidak selalu demikian, dan memahami mengapa adalah titik masuk yang paling penting dari diskusi ini.

Kebaikan yang Nyata dan Harus Diakui

Sebelum memasuki persoalan yang lebih dalam, ada kewajiban intelektual untuk mengakui secara eksplisit dampak positif yang memang nyata dan terukur.

Di banyak daerah terpencil Indonesia, daging merah bukan konsumsi harian, bahkan bukan bulanan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis resmi oleh Kementerian Kesehatan pada Mei 2025, prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen. Setara dengan sekitar 4,8 juta anak di bawah lima tahun yang masih mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis. Konsumsi daging sapi Indonesia hanya mencapai 2,57 kilogram per kapita per tahun (2024). Jauh di bawah rata-rata ASEAN yang mencapai 6–8 kilogram. Dalam konteks defisit protein hewani yang nyata ini, distribusi daging kurban yang menjangkau pelosok memberikan kontribusi gizi yang bermakna, terutama bagi anak-anak usia pertumbuhan dan ibu hamil.

Ada pula dimensi yang lebih sulit dikuantifikasi namun tidak kalah nyata: kohesi sosial. Proses menyembelih, menguliti, memotong, mengemas, dan membagi daging bersama adalah praktik gotong royong yang di kota-kota besar yang semakin individualistis kini hanya terjadi sekali dalam setahun. Robert Putnam dalam Bowling Alone (2000) mendokumentasikan bagaimana menipisnya praktik kolektif semacam ini berkorelasi dengan melemahnya jaringan kepercayaan sosial. Momen kurban adalah salah satu dari sedikit kesempatan yang tersisa bagi masyarakat urban untuk mengalami solidaritas kolektif secara langsung. Aset sosial yang nilainya jauh melampaui kandungan proteinnya.

Di banyak desa peternakan, ada momen yang jarang disebut namun menyentuh: para peternak yang biasanya hanya menjual ternak tanpa pernah menikmati hasilnya sendiri, kadang mendapat bagian dari distribusi daging kurban yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang menjangkau daerah mereka. Kecil. Tapi ada martabat dalam momen itu yang tidak bisa diukur secara ekonomi semata.

Jika kita gunakan kerangka SROI (Social Return on Investment) semua dampak ini adalah nilai sosial yang nyata dan dapat diklaim. Namun analisis SROI yang jujur juga meminta kita menghitung sisi lain: dampak yang tidak diinginkan, biaya tersembunyi yang tidak masuk dalam laporan, dan kerusakan yang bergerak perlahan tanpa pernah ada yang berniat menyebabkannya.

Wajah Peternak Rakyat yang Sering Luput dari Perhatian

Sebelum membahas kerusakan sistemik yang perlu kita benahi bersama, kita perlu mengenal lebih dekat siapa sesungguhnya peternak rakyat Indonesia. Karena di sinilah akar dari seluruh persoalan sekaligus kunci dari seluruh solusi.

Peternak rakyat bukan entitas bisnis dalam pengertian konvensional. Rata-rata peternak sapi potong rakyat memiliki 2–3 ekor sapi. Ternak adalah bentuk tabungan biologis yang dicairkan saat ada kebutuhan mendesak: biaya sekolah anak yang tidak bisa ditunda, biaya berobat yang mendadak, atau modal usaha kecil yang dibutuhkan untuk musim tanam berikutnya. Mereka bukan pemalas dan bukan tidak mau berkembang. Mereka adalah pelaku ekonomi yang rasional dalam sistem yang tidak pernah dirancang untuk membuat mereka sejahtera.

Profil sosial-ekonomi peternak rakyat Indonesia menggambarkan kelompok yang rentan secara struktural. Sebagian besar adalah petani yang merangkap peternak. Beternak bukan sebagai usaha utama melainkan sebagai diversifikasi penghasilan. Akses mereka terhadap modal formal sangat terbatas: lembaga perbankan mensyaratkan agunan dan administrasi yang tidak terjangkau oleh usaha skala rumah tangga. Akses mereka terhadap informasi pasar juga sangat terbatas: mereka tidak tahu berapa harga hewan kurban yang berlaku di kota, tidak tahu lembaga mana yang membeli dengan harga terbaik, dan tidak memiliki kapasitas untuk menyimpan ternak sambil menunggu saat harga paling menguntungkan.

Ketika Idul Adha tiba dan pedagang musiman datang membeli, peternak tidak memiliki pilihan selain menerima harga yang ditawarkan. Pedagang musiman hadir dalam jangka pendek, membeli dalam volume, dan memiliki informasi harga yang jauh lebih lengkap dari peternak. Asimetri informasi ini adalah salah satu sumber ketidakadilan struktural yang paling konsisten dalam rantai pasok kurban, namun jarang dibahas karena tidak terlihat dari permukaan.

Penelitian oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan bahwa margin keuntungan riil peternak sapi rakyat sering kali hanya berkisar 5–15 persen dari biaya produksi penuh. Angka itu pun jarang memperhitungkan nilai tenaga kerja keluarga yang dicurahkan selama bertahun-tahun merawat ternak. Jika tenaga kerja keluarga dihitung sebagai biaya produksi yang sesungguhnya, sebagian besar peternak rakyat beternak dengan nilai ekonomi yang tidak berkelanjutan. Mereka mempertahankan usaha ini bukan karena menguntungkan, melainkan karena tidak ada alternatif yang lebih baik. Ikatan budaya dan identitas yang dalam antara peternak dan ternaknya yang tidak bisa semata-mata diukur secara finansial.

Yang penting untuk dipahami adalah bahwa peternak rakyat bukan hanya pemasok hewan kurban. Mereka adalah pengelola sumber daya genetik ternak lokal yang merupakan warisan biologis bangsa ini. Cara kita memperlakukan mereka dalam ekosistem kurban, apakah kita memberi mereka harga yang adil, apakah kita melindungi populasi breeding mereka dari seleksi negatif, apakah kita membangun sistem yang memungkinkan mereka berkembang akan menentukan apakah warisan genetik itu terjaga atau terkikis generasi demi generasi.

Yang Tersembunyi di Balik Kebaikan

Erosi Genetik: Kerusakan yang Bergerak dalam Diam

Ada dua proses yang sedang berjalan secara bersamaan di balik ekosistem kurban Indonesia. Keduanya perlu dipahami bersama agar bisa diatasi bersama pula.

Proses pertama terjadi di tingkat genetik dan bersifat kumulatif. Semua orang menginginkan hewan terbaik untuk kurban: sapi besar, kambing gemuk, fisik sempurna. Itu adalah syarat syariat sekaligus syarat sosial yang wajar dan dapat dipahami. Namun dalam ilmu pemuliaan ternak, pola pemilihan ini menghasilkan apa yang dikenal sebagai seleksi negatif pada populasi: individu-individu ternak dengan nilai genetik tertinggi justru yang paling banyak keluar dari siklus reproduksi, sementara individu ternak

yang tidak memenuhi standar pasar. Yang terlalu kecil, kurang gemuk, atau kurang menarik untuk dijual. Yang tersisa sebagai calon induk generasi berikutnya.

Generasi demi generasi, tanpa siapa pun bermaksud demikian, kualitas rata-rata genetik populasi ternak bergerak ke arah yang salah. Ini bukan teori spekulatif. FAO dalam The Second Report on the State of the World's Animal Genetic Resources for Food and Agriculture mendokumentasikan bahwa 17 persen dari ras ternak yang terdaftar secara global kini berada dalam kondisi terancam punah. Seleksi negatif berulang adalah salah satu mekanisme penyebabnya.

Indonesia memiliki lebih dari 30 ras ternak lokal yang unik dan bernilai tinggi secara internasional. Berdasarkan data BPS, populasi sapi potong Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 13,27 juta ekor. Angka yang baru mulai pulih setelah anjlok ke 10,83 juta ekor pada 2023 akibat dampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Di dalam populasi yang masih dalam fase pemulihan inilah, seleksi negatif akibat pola kurban terus bekerja. Sapi Bali, yang secara historis menyumbang sekitar seperempat dari total populasi sapi nasional, diakui secara global memiliki thriftiness yang luar biasa. Kemampuan bertahan dan berproduksi dalam kondisi pakan terbatas dan iklim tropis ekstrem yang tidak dimiliki oleh ras-ras impor. Sapi Madura memiliki ketahanan terhadap penyakit tertentu yang endemik di ekosistem pantai utara Jawa. Kambing Kacang memiliki laju reproduksi dan kemampuan adaptasi pakan yang sangat efisien untuk konteks peternakan rakyat skala kecil. Domba Garut dapat mencapai bobot yang tinggi. Ras-ras ini adalah warisan biologis yang tidak bisa direplikasi di laboratorium dan tidak bisa diimpor dari negara mana pun. Sekali hilang, hilang selamanya.

Tekanan Harga yang Menggerus Keberlanjutan

Proses kedua terjadi di tingkat ekonomi dan terjadi setiap tahun dalam siklus yang semakin mengeras. Ketika puluhan lembaga dan korporasi terjun ke pasar hewan dalam jangka waktu yang sangat singkat dan bersamaan, tekanan persaingan tidak hanya terjadi di sisi permintaan. Yang sering tidak terlihat adalah kompetisi di sisi lembaga untuk menawarkan paket kurban dengan harga paling terjangkau kepada donatur. Untuk mempertahankan efisiensi biaya itu, tekanan diteruskan ke bawah rantai pasok: ke pedagang, dan pada akhirnya ke peternak yang posisi tawarnya paling lemah.

Data terbaru menggambarkan betapa dalamnya defisit yang harus dihadapi sistem peternakan nasional kita. Outlook Komoditas Peternakan dari Kementerian Pertanian memproyeksikan bahwa pada 2025, produksi daging sapi dan kerbau nasional hanya mencapai sekitar 491,7 ribu ton, sementara konsumsi nasional diestimasi mencapai 724,2 ribu ton. Meninggalkan defisit sebesar 236,5 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor. Sepanjang Januari hingga Agustus 2024, Indonesia mengimpor sapi hidup dari Australia senilai USD 340,23 juta. Angka itu belum mencakup kuartal terakhir. Ketergantungan ini bukan sekadar persoalan anggaran. Ini adalah kerentanan struktural yang nyata: ketika pasokan dari Australia terganggu akibat kebijakan ekspor, gangguan logistik, atau perubahan iklim yang memengaruhi produksi ternak di sana, Indonesia tidak memiliki cadangan kapasitas produksi internal yang memadai untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Ironi terbesar ada di sini: dengan lebih dari 12 juta rumah tangga yang mengusahakan peternakan dan 4 juta unit usaha peternakan sapi potong yang tersebar di seluruh nusantara, Indonesia sesungguhnya memiliki infrastruktur produksi terdistribusi yang potensial luar biasa. Yang tidak dimiliki adalah sistem yang memungkinkan potensi itu berkembang. Salah satu titik kritis dari sistem itu adalah ekosistem kurban yang saat ini berulang kali menekan, alih-alih memperkuat, daya hidup peternak rakyat.

Dua proses ini, yaitu erosi genetik dan tekanan harga, berjalan bersamaan tanpa pernah dimaksudkan oleh siapa pun. Tidak ada lembaga kurban yang berniat merusak plasma nutfah nasional. Tidak ada korporasi yang berniat menindas peternak. Namun niat yang baik tanpa sistem yang dirancang dengan baik tidak menjamin dampak yang baik. Di sinilah letak tantangan bersama kita. Disinilah pula letak peluang terbesarnya.

Sistem Tiga Strata: Fondasi Kemandirian Ternak yang Sudah Terbukti

Solusi untuk persoalan yang telah diuraikan di atas bukan sesuatu yang perlu ditemukan dari nol. Dalam ilmu peternakan, kerangka solusinya telah lama ada, telah diimplementasikan di berbagai negara, dan hasilnya konsisten: sistem produksi ternak tiga strata. W. Hardjosubroto mendokumentasikan konsep ini dalam konteks Indonesia sejak 1994. Yang belum pernah terjadi adalah penerapannya secara serius, konsisten, dan terkoordinasi di tingkat nasional. Momen kurban, dengan nilai estimasi ekonominya yang mencapai Rp 27–28 triliun setiap tahun, menyimpan potensi besar untuk menjadi salah satu motor penggerak sistem ini, jika ekosistemnya dirancang dengan benar.

Sistem tiga strata membagi seluruh aktivitas produksi ternak ke dalam tiga lapisan yang saling bergantung dan saling menopang. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik, populasi ternak yang spesifik, dan semestinya memiliki perlindungan yang spesifik pula dari tekanan pasar yang tidak sesuai dengan fungsinya. Memahami ketiga lapisan ini dan hubungan di antara mereka adalah prasyarat untuk memahami bagaimana ekosistem kurban dapat berkontribusi, alih-alih merusak, kemandirian ternak nasional.

Strata Pertama: Breeding Farm sebagai Bank Genetik Bangsa

Breeding farm adalah lapisan pertama dan paling fundamental dari seluruh sistem. Di sinilah grandparent stock yaitu bibit inti yang memiliki nilai genetik tertinggi dihasilkan, dipilih, dirawat, dan dijaga dengan ketat. Breeding farm adalah bank genetik hidup bangsa. Dari populasi di strata inilah seluruh rantai produksi ternak nasional bermula, dan dari sinilah kualitas genetik populasi ternak nasional ditentukan untuk puluhan tahun ke depan.

Fungsi utama breeding farm bukan memproduksi daging atau hewan jual, melainkan memproduksi bibit. Setiap ternak di strata ini adalah investasi genetik jangka panjang. Nilainya bukan pada bobot badannya hari ini, melainkan pada kualitas genetik yang akan diturunkan kepada ribuan keturunannya di masa depan. Inilah mengapa perlindungan strata pertama dari tekanan rantai kurban adalah

keharusan yang tidak bisa dikompromikan: ketika sapi terbaik dari breeding farm masuk ke jalur pemotongan, bukan hanya satu ekor sapi yang hilang; yang hilang adalah potensi genetik ribuan keturunannya yang tidak pernah akan lahir.

Di Indonesia, breeding farm yang terstruktur masih sangat terbatas. Balai Inseminasi Buatan (BIB) dan Balai Embrio Ternak (BET) yang dikelola pemerintah menjalankan sebagian fungsi ini, namun kapasitasnya jauh dari mencukupi untuk skala kebutuhan nasional. Pengembangan breeding farm yang melibatkan koperasi peternak rakyat, dengan pendampingan teknis yang terstruktur dari balai pemerintah dan peran berbagai universitas, adalah jalur yang paling realistis untuk memperbesar kapasitas ini sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak di level hulu.

Negara-negara yang berhasil membangun kemandirian genetik ternaknya seperti Australia dengan program National Beef Recording Scheme, Brasil dengan program Embrapa Pecuaria Sudeste, dan Selandia Baru dengan Sheep Improvement Limited; semuanya memulai dari investasi jangka panjang yang serius pada strata breeding. Hasilnya baru terasa dalam 10–20 tahun, tetapi begitu fondasi genetik itu kuat, seluruh rantai produksi di atasnya menjadi lebih efisien, lebih produktif, dan lebih kompetitif secara berkelanjutan. Indonesia memiliki ras-ras lokal yang, jika dilindungi dan dikembangkan dengan serius, berpotensi menjadi aset genetik yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga memiliki nilai ekspor.

Strata Kedua: Multiplier Farm sebagai Jembatan Genetik dan Produksi

Lapisan kedua adalah multiplier farm. Fungsinya adalah menerima bibit dari breeding farm dan memperbanyaknya dalam skala yang lebih besar untuk menghasilkan parent stock. Induk-induk yang akan digunakan oleh peternakan komersial di strata ketiga. Multiplier farm adalah jembatan antara genetik unggul yang dihasilkan di strata pertama dan produksi ternak komersial dalam skala massal yang dibutuhkan oleh pasar.

Tanpa multiplier farm yang sehat dan berkapasitas, ternak unggul dari breeding farm tidak bisa sampai ke tangan peternak komersial rakyat dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau. Bottleneck di strata kedua inilah yang sering menjadi hambatan paling nyata dalam pengembangan kualitas ternak rakyat di banyak wilayah Indonesia. Peternak yang ingin meningkatkan kualitas ternaknya tidak memiliki akses ke bibit yang baik karena tidak ada multiplier farm di dekat mereka, dan akhirnya membeli bibit seadanya dari pasar hewan dengan kualitas genetik yang tidak terverifikasi sehingga upaya peningkatan kualitas berhenti di titik itu.

Pengembangan multiplier farm di tingkat kabupaten, yang bisa dikelola oleh koperasi peternak daerah dengan dukungan teknis dari dinas peternakan provinsi dan dengan akses ke program kredit usaha rakyat yang dipermudah adalah langkah struktural yang paling realistis untuk memperkuat lapisan ini. Beberapa kabupaten di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan telah menunjukkan bahwa model koperasi peternak yang terhubung dengan balai bibit daerah bisa berfungsi dengan baik

jika ada pendampingan yang konsisten. Pengalaman-pengalaman ini perlu didokumentasikan dampaknya secara serius dan direplikasi ke daerah-daerah lain dengan penyesuaian konteks lokal.

Strata Ketiga: Commercial Farm sebagai Satu-satunya Sumber Hewan Kurban

Lapisan ketiga adalah commercial farm. Peternakan yang memproduksi ternak untuk konsumsi. Ini adalah strata yang paling dekat dengan pasar dan paling banyak melibatkan peternak rakyat skala kecil. Hewan-hewan yang dihasilkan di strata ketiga inilah -dan hanya dari strata ini- yang semestinya menjadi sumber hewan kurban.

Prinsip ini sederhana namun belum pernah diterapkan secara sistematis dalam ekosistem kurban Indonesia: pastikan bahwa hewan yang memasuki jalur pemotongan kurban adalah hewan dari strata komersial, bukan dari strata breeding atau multiplier. Menerapkan prinsip ini secara konsisten akan secara langsung melindungi populasi breeding dari seleksi negatif. Dan pada saat yang sama memastikan bahwa permintaan kurban menjadi insentif yang tepat bagi peternak komersial untuk meningkatkan kualitas produksinya, bukan hukuman bagi peternak breeding yang kehilangan induk terbaiknya.

Commercial farm rakyat skala kecil, 3–10 ekor sapi atau 10–20 ekor kambing sesungguhnya adalah bentuk yang paling sesuai dengan geografi dan ekologi Indonesia. Mereka tersebar merata di seluruh wilayah, memiliki pengetahuan lokal tentang ekosistem dan pakan yang tidak dimiliki peternakan besar terpusat, dan memiliki ikatan dengan komunitas yang membuat ternak mereka dipelihara dengan perhatian yang lebih personal. Yang mereka butuhkan adalah akses ke bibit berkualitas dari strata kedua, pendampingan teknis yang terjangkau, pasar yang transparan dan memberikan harga yang adil, serta perlindungan dari volatilitas harga musiman yang selama ini menggerus margin mereka.

Tiga Strata sebagai Satu Sistem yang Terintegrasi

Kekuatan sistem tiga strata bukan hanya pada masing-masing lapisannya, melainkan pada integrasinya sebagai satu kesatuan yang saling menopang. Breeding farm menghasilkan bibit terbaik yang mengalir ke multiplier farm. Multiplier farm memperbanyak dan mendistribusikan bibit itu ke commercial farm. Commercial farm memproduksi ternak berkualitas yang kemudian memasuki pasar konsumsi, termasuk pasar kurban. Dan sebagian keuntungan dari pasar konsumsi semestinya mengalir kembali ke hulu: mendanai pengembangan breeding farm, mendukung operasional multiplier farm, dan meningkatkan kapasitas commercial farm rakyat.

Dalam konteks kurban, momen Idul Adha dengan nilai ekonominya yang mencapai Rp 27–28 triliun bisa menjadi salah satu motor terkuat dari siklus investasi ini. Ekosistemnya harus dirancang dengan benar. Lembaga-lembaga kurban yang berkomitmen membeli hanya dari commercial farm yang tersertifikasi dalam sistem tiga strata, yang membayar harga yang adil kepada peternak, dan yang mengalokasikan sebagian dananya untuk pengembangan kapasitas peternak, secara langsung

berkontribusi pada penguatan keseluruhan sistem. Mereka bukan lagi sekadar distributor kebaikan. Mereka menjadi investor dalam kemandirian ternak nasional.

Ini adalah visi yang konkret, terukur, dan realistis. Bukan utopia. Yang dibutuhkan adalah kesepakatan antar aktor tentang standar, mekanisme verifikasi yang dapat dipercaya, insentif yang tepat untuk mendorong kepatuhan, dan komitmen jangka panjang dari semua pihak untuk menjalankannya secara konsisten. Defisit daging 236,5 ribu ton yang diproyeksikan pada 2025. Yang diperkirakan berlanjut hingga 2028 adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan: tanpa investasi serius pada sistem tiga strata, ketergantungan impor akan terus berlanjut, dan ekosistem kurban akan terus beroperasi di atas fondasi yang rapuh.

Dari Charity ke Investasi Sosial: Merancang Ekosistem yang Lebih Baik

Membangun ekosistem kurban yang mendukung. Bukan merusak. Peternakan rakyat dan kemandirian genetik ternak nasional membutuhkan empat pergeseran cara berpikir yang saling berkaitan.

Pergeseran pertama adalah dari opasitas menuju transparansi rantai pasok. Saat ini, sebagian besar pekurban tidak mengetahui, dan tidak bisa mengetahui, dari mana hewan kurban yang mereka titipkan berasal, berapa harga yang dibayarkan kepada peternak, atau apakah hewan itu berasal dari populasi breeding yang seharusnya dilindungi. Transparansi ini bukan hanya soal etika. Ini adalah syarat dasar dari akuntabilitas. Indonesia telah menginisiasi sistem identifikasi ternak nasional dengan ear tag elektronik dan basis data terpusat. Sistem ini, jika dijalankan konsisten dan diintegrasikan ke dalam ekosistem kurban, bisa menjadi alat verifikasi yang kuat: setiap hewan yang memasuki jalur kurban dapat dilacak asal-usulnya, strata produksinya, dan riwayat pemeriksaan kesehatannya. Ini adalah investasi infrastruktur digital yang manfaatnya jauh melampaui momen kurban.

Pergeseran kedua adalah dari persaingan harga ke standar harga yang adil. Kompetisi antar lembaga kurban dalam menawarkan paket termurah kepada donatur adalah mekanisme yang, tanpa disadari, memindahkan tekanan biaya kepada pihak yang paling lemah dalam rantai. Prinsip fair trade yang telah terbukti mengubah dinamika rantai pasok dalam komoditas kopi, kakao, dan the semestinya dapat diadaptasi untuk ekosistem kurban. Harga referensi minimum di tingkat peternak yang ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya produksi riil, disepakati bersama oleh asosiasi lembaga kurban, dan diawasi pelaksanaannya, akan melindungi keberlanjutan usaha peternak tanpa harus mengorbankan aksesibilitas program bagi pekurban.

Pergeseran ketiga adalah membangun mekanisme reinvestasi yang sistematis. Tidak ada ekosistem produksi yang bisa berkelanjutan tanpa investasi kembali ke sumber dayanya. Lima persen saja dari total nilai program kurban lembaga-lembaga besar jika dapat dialokasikan secara konsisten untuk pengembangan kapasitas peternak, program kesehatan ternak komunitas, atau modal bergulir koperasi peternak sudah akan menghasilkan dampak kumulatif yang signifikan dalam 5–10 tahun. Ini bukan derma tambahan; ini adalah supply chain investment yang menjamin ketersediaan hewan berkualitas

untuk program kurban di tahun-tahun mendatang. Tanpa peternak yang sejahtera dan populasi ternak yang sehat, tidak ada program kurban yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang.

Pergeseran keempat adalah dari distribusi yang transaksional menuju intervensi yang transformatif. Distribusi daging ke daerah terpencil adalah kebaikan yang nyata, namun ia berhenti di satu titik waktu. Program kurban yang transformatif adalah yang menjadikan momen distribusi sebagai pintu masuk ke perubahan yang lebih struktural: pengembangan kelompok peternak lokal sebagai pemasok jangka panjang, koperasi pangan komunitas yang menghubungkan peternak dengan konsumen tanpa perantara berlebihan, atau program gizi berbasis ternak yang berkelanjutan. Beberapa lembaga telah mengembangkan model kurban produktif. Sebagian hewan tidak langsung disembelih melainkan diberikan sebagai modal ternak kepada keluarga prasejahtera yang terseleksi dengan pendampingan pengelolaan. Pendekatan ini perlu ditingkatkan dari status inovasi pinggiran menjadi bagian dari standar program kurban yang bertanggung jawab.

Tanggung Jawab Bersama, Peran yang Berbeda

Tidak ada satu pihak yang mampu membenahi ekosistem ini sendirian. Justru itulah yang membuatnya menjadi tantangan yang menarik: setiap aktor memiliki peran yang tidak bisa digantikan oleh yang lain, dan setiap langkah yang diambil satu pihak akan membuka jalan bagi langkah pihak lainnya. Perubahan ekosistem yang seperti ini dimana banyak aktor saling bergantung membutuhkan koordinasi dan kepercayaan, bukan hanya niat yang baik dari masing-masing pihak secara terpisah.

Pemerintah memegang peran yang tidak bisa didelegasikan: menyediakan kerangka kebijakan yang koheren dan insentif yang tepat. Panduan nasional hewan kurban yang selama ini berfokus pada syarat fisik dan prosedur penyembelihan dapat diperluas. Secara bertahap, dengan proses konsultasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencakup dimensi keberlanjutan: standar asal usul ternak berdasarkan sistem tiga strata, panduan harga referensi di tingkat peternak, dan mekanisme verifikasi yang dapat dipercaya. Koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional untuk menghubungkan momen tahunan yang bernilai puluhan triliun ini dengan agenda jangka panjang kemandirian pangan protein adalah langkah strategis yang sudah lama tertunda.

Lembaga filantropi memiliki kesempatan untuk mendefinisikan ulang standar keberhasilan program kurban mereka. Ukuran keberhasilan yang hanya berbicara tentang jumlah ekor hewan dan jangkauan distribusi sudah tidak cukup untuk masyarakat donatur yang semakin literat tentang dampak. Apakah peternak yang memasok ternak kepada lembaga tersebut memiliki posisi ekonomi yang lebih baik setelah transaksi? Apakah komunitas penerima memiliki akses pangan yang lebih baik secara berkelanjutan, bukan hanya pada hari H? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah ukuran outcome yang semestinya menjadi standar pelaporan baru. Membangun konsorsium lembaga kurban yang bersepakat pada standar minimum; termasuk standar harga minimum kepada peternak adalah langkah yang realistis dan akan memperkuat kepercayaan publik secara kolektif.

Korporasi yang menjadikan ESG sebagai komitmen publik memiliki kesempatan untuk menunjukkan konsistensi itu secara konkret. Program kurban yang membeli dari peternak dengan harga adil, yang bisa memverifikasi asal usul ternak, dan yang mendampingi komunitas penerima ke arah kemandirian adalah narasi keberlanjutan yang jauh lebih kuat dari sekadar laporan kuantitatif tentang jumlah hewan dan kilogram daging yang didistribusikan. Supply chain yang bertanggung jawab dalam program kurban adalah perpanjangan logis dari komitmen ESG yang sudah dinyatakan. Keduanya seharusnya menggunakan standar yang konsisten.

Para ulama dan tokoh agama memiliki otoritas moral yang tidak tertandingi di momen Idul Adha. Panduan teologis yang diperluas untuk mencakup dimensi keadilan ekonomi bagi peternak. Bahwa kurban yang menunaikan amanahnya secara penuh semestinya juga memastikan keadilan bagi semua pihak dalam rantai pasoknya. Dimensi kelestarian alam. Dahwa merusak plasma nutfah ternak lokal bertentangan dengan prinsip hifzh al-bi'ah dalam maqashid syariah akan mengubah cara jutaan orang mendekati momen ini lebih efektif dari regulasi mana pun. Otoritas moral adalah lever perubahan yang paling kuat dalam konteks seperti ini.

Setiap individu pekurban, memiliki kekuatan yang sering kali tidak mereka sadari: kekuatan pilihan konsumen yang terinformasi. Bertanya kepada lembaga kurban tentang asal usul ternak mereka, apakah peternak dibayar dengan harga yang adil, apakah ada program pemberdayaan yang menyertai distribusi adalah bentuk akuntabilitas horizontal yang sangat efektif. Permintaan yang datang dari jutaan pekurban yang sadar akan mendorong standar industri ke arah yang lebih baik lebih cepat dari regulasi mana pun yang berjalan dari atas ke bawah.

Kurban Terlalu Mulia untuk Tidak Kita Kelola dengan Baik

Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadikan ekosistem kurban sebagai salah satu motor terkuat pembangunan peternakan rakyat dan kemandirian pangan protein nasional. Tradisi filantropi yang berakar kuat dan dijalankan secara konsisten setiap tahun. Kekayaan ras ternak lokal yang merupakan warisan biologis yang tidak ternilai dan tidak dimiliki bangsa lain. Lebih dari 12 juta rumah tangga peternak yang tersebar di seluruh nusantara, yang selama ini bertahan dalam ketidakpastian—termasuk menghadapi dampak wabah PMK yang menghancurkan populasi sapi nasional pada 2023—dan terus merawat ternak mereka dengan kesungguhan yang layak mendapat penghargaan, bukan sekadar belas kasihan.

Yang belum dimiliki adalah sistem. Koordinasi. Standar yang disepakati bersama. Dan keberanian kolektif untuk mengubah cara kita mengelola kebaikan yang luar biasa besar ini—bukan dengan meragukan niatnya, melainkan dengan meningkatkan kualitas sistemnya.

Sistem tiga strata produksi ternak memberikan kerangka yang jelas untuk perubahan itu. Breeding farm yang dilindungi sebagai bank genetik bangsa. Multiplier farm yang didukung sebagai jembatan distribusi bibit berkualitas ke seluruh penjuru wilayah. Commercial farm rakyat yang diperkuat sebagai ujung tombak produksi sekaligus satu-satunya sumber yang sah bagi hewan kurban. Ekosistem kurban yang transparan, yang membayar peternak dengan adil, yang menginvestasikan kembali sebagian

nilainya ke dalam rantai produksi yang menopangnya. Ini bukan blueprint yang membutuhkan teknologi canggih atau anggaran yang mustahil. Ini adalah soal pilihan dan komitmen.

Nilai ekonomi kurban yang mencapai Rp 27–28 triliun setiap tahun adalah kekuatan yang sesungguhnya, jika diarahkan dengan benar. Bayangkan bahkan hanya lima persen dari energi ekonomi itu diarahkan secara sadar, dirancang dengan serius, dikelola secara kolaboratif oleh pemerintah, lembaga, korporasi, dan komunitas peternak untuk membangun fondasi peternakan rakyat yang berkelanjutan. Proyeksi defisit daging 236,5 ribu ton di 2025 yang diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir dekade ini bukan sekadar angka statistik. Tapi menjadi tagihan masa depan yang sedang kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Kecuali kita mulai membangun jawabannya sekarang.

Dampaknya tidak akan terasa hari ini. Tetapi investasi sosial memang tidak bekerja untuk hari ini saja. Bekerja untuk generasi yang akan datang, yang akan mewarisi ekosistem ternak yang kita jaga atau kita gerus hari ini, tanpa pernah kita tanyakan pendapat mereka.

Peternak rakyat kita tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan sistem yang adil, pasar yang transparan, harga yang mencerminkan kerja keras mereka, dan pengakuan bahwa tanpa mereka, tidak ada satu pun hewan kurban yang bisa kita sediakan. Kurban terlalu mulia untuk dikelola dengan cara yang tidak sepadan dengan kemuliaannya. Saatnya niat yang besar itu bertemu dengan sistem yang setara besarnya, dibangun bersama, oleh semua pihak yang peduli, untuk semua generasi yang akan mewarisi hasilnya.

PERNYATAAN UMUM *(DISCLAIMER)*

Seluruh penunjukan, pendapat, dan ekspresi yang disampaikan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Isi tulisan tidak selalu mencerminkan pandangan resmi Social Investment Indonesia maupun mitra- mitra strategisnya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan isu hukum, batas teritorial, dan kelembagaan. Setiap analisis, interpretasi, dan sudut pandang yang digunakan disampaikan dalam kerangka akademik dan dialogis, serta tidak dimaksudkan untuk mewakili posisi institusional organisasi manapun.

Social Investment Indonesia
E-mail: info@socialinvestment.id

TENTANG SOCIAL INVESTMENT INDONESIA (SII)

Social Investment Indonesia (SII) adalah inisiatif independen yang mendorong praktik investasi sosial yang berdampak, terukur, dan kolaboratif untuk mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Melalui layanan pengetahuan, fasilitasi multipihak, dan verifikasi dampak, SII berupaya memperkuat tata kelola sosial yang inklusif dan berbasis nilai.

Social Investment Indonesia